

KRITIK SLOGAN “NKRI HARGA MATI”

(Analisis Teori Objektivisme Louis Paul Pojman Sebagai Kritik
Utilitarianisme John Stuart Mill)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu(S-1) dalam Fakultas Ushuluddin dan filsafat



Oleh :

ABIMANYU ANDHIKA SAKTI

NIM : E21215056

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

(Analisis Teori Objektivisme Sebagai Kritik Utilitarianisme John Stuart Mill)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abimanyu Andhika Sakti

Nim : E21215056

Semester : VIII

Jurusan/Prodi : Aqidah Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul Skripsi : KRITIK SLOGAN NKRI HARGA MATI (Analisis Teori Objektivisme Kritik Utilitarianisme John Stuart Mill)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Abimanyu Andhika Sakti
E21215056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Abimanyu Andhika Sakti** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Suhermanto, M.Hum

NIP.196708201995031001

Pembimbing II



M. Helmi Umam, M.Hum

NIP.197905042009011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Abimanyu Andhika Sakti** ini telah dipertahankan di depan Tim
Penguji Skripsi

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Suhermanto, M.Hum

NIP. 196708201995031001

Sekretaris,

M. Helmi Umam, M.Hum

NIP. 197905042009011010

Penguji I,

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D

NIP. 197008132005011003

Penguji II,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag

NIP. 19720625200501007



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abimanyu Andhika Sakti

NIM : E21215056

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam

E-mail address : abimanyuandhikasakti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

KRITIK SLOGAN "NKRI HARGA MATI" (Analisis Teori Objektivisme Sebagai Kritik Utilitarianisme John Stuart Mill)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis



(Abimanyu Andhika Sakti)

BAB III	: DINAMIKA SLOGAN NKRI HARGA MATI	
	A. Dinamika Munculnya Slogan NKRI Harga Mati	54
BABIV	:KRITIK OBJEKTIVITISME LOUIS PAUL POJMAN TERHADAP UTILITARIANISME JOHN STUART MILL DALAM FENOMENA SLOGAN “ NKRI HARGA MATI “	
	1. Jejaring Kuasa Slogan “NKRI Harga Mati” Terhadap Kelompok Mayoritas	71
	2. Pandangan Mill Terhadap Pertentangan Antara Mayoritas dan Minoritas	76
	3. Kritik Pojman Terhadap Utilitarianisme Jhon Stuart Mill	81
	4. Pandangan Pojman Terhadap Slogan “NKRI Harga Mati” dan Kritiknya Terhadap Pandangan Mill	83
BABV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN		

Dapat dikatakan, keseksian slogan “NKRI Harga Mati” sepiantas memperlihatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Diksi Harga Mati seakan-akan menunjukkan bentuk dedikasi tinggi terhadap negara lalu menempatkan kemaslahatan negara berada di atas kemaslahatan segalanya. Slogan ini pun cukup membius memabukkan banyak kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka terjebak oleh mekanisme kekuasaan yang bersemayam di dalam slogan tersebut. Kelugasan serta ketegasan bahasa mempengaruhi psikis para pendengar untuk mengajak mereka bergabung mendedikasikan kepada negara. Namun, di sisi lain, ternyata slogan ini menyimpan sejumlah kuasa yang kasat mata seperti pertentangan antara dua kubu yang saling bertarung antara kubu mayoritas dan minoritas.

Keberadaan slogan “NKRI Harga Mati” itu sendiri merupakan barang yang tidak bisa dilepas dari proyeksi antara kedua kubu yang bertikai. Tanpa disangka, slogan “NKRI Harga Mati” yang digemborkan oleh kaum mayoritas menimbulkan suatu intimidasi terhadap kaum minoritas. Justifikasi ini didapatkan dari hasil pembacaan Penulis terhadap pengamatan secara kritis terkait kepentingan yang melekat pada slogan tersebut oleh kaum mayoritas terhadap minoritas. Hal ini bisa dibaca berkat dari adanya slogan tersebut, rating kaum mayoritas mengalami naik daun di kancah percaturan konsep kebahagiaan-keadilan nasional. Jika ditarik kepada pembahasan lebih lanjut, fenomena demikian secara otomatis menarik kelas minoritas pada ajang kontestasi percaturan politik

dalam rangka mencapai kebahagiaan di kancah nasional lalu membawanya ke pinggiran. Tentu ini merupakan bentuk intimidasi kepada kaum minoritas.

Untuk membuktikan hal di atas, penulis pertama kali berangkat dari sebuah asumsi bahwa setiap kelas baik mayoritas maupun minoritas memiliki komitmen, pemikiran, langkah dan cara tersendiri untuk mencapai kebahagiaan bersama apalagi kebahagiaan itu terarahkan pada kontestasi mencapai kebahagiaan dalam bentuk keadilan yang dinahkodai oleh negara. Keduanya sama-sama berangkat dari kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap partisipasi stabilitas keamanan, kesejahteraan, yang lagi-lagi tidak bisa terlepas demi tercapainya nilai-nilai keadilan. Hanya saja, perbedaan di antara kedua kelompok tadi terletak pada langkah taktis dalam merealisasikan ide masing-masing. Kelompok pertama mengatakan

bahwa kebahagiaan bisa dicapai tanpa harus mengganti sistem pemerintahan. Adapun kelompok kedua lebih menekankan kepada usaha reformasi secara besar-besaran hingga pada ranah radikal seperti sistem pemerintahan, kenegaraan dan perundang-undangan.

Pada kelompok terakhir mereka selalu dipandang sebelah mata. Banyak sekali justifikasi miring yang disematkan kepadanya mulai dari kelompok radikal, pengkhianat bahkan pemberontak. Seakan-akan mereka merupakan kaum yang harus dihadapi dengan palu dan gadah, bukan dengan semangat kebinekaan dalam menyikapi perbedaan. Sebagai negara

yang berazaskan Pancasila dengan slogan utamanya ialah Bhinneka Tunggal Ika, tentu menjadi suatu tindakan paradoks jika mereka dinilai sebagai kaum yang selalu mengarah kepada keburukan, dari pada dipandang dari sisi kemanusiaan seperti introspeksi menyikapi fenomena tersebut sebagai kekecewaan kurang maksimal atau ketidakseriusan pemerintah dalam mengemban amanah kedaulatan rakyat.

Lalu, adanya slogan “NKRI Harga Mati” semakin memperkeruh keadaan. Slogan ini semakin menarik simpati masyarakat luas agar berpihak kepada kaum mayoritas, yang secara bersamaan menuai antipati kepada kaum minoritas. Konsekuensinya, mereka selalu dipandang dengan stigma negatif daripada manusia biasa yang memiliki rasa kekecewaan jika pemimpinnya telah gagal dalam mengemban amanah kedaulatan rakyat.

Kedua kelompok tadi sama-sama berkonflik dalam ajang kompetisi di antara dua kelas untuk menghegemoni ide-ide kebahagiaan yang nantinya diadopsi oleh pemerintah, dan dari pemerintah kemudian didistribusikan kepada rakyat. Keduanya berkompetisi dalam perang posisi untuk memperebutkan kursi dominasi ide-ide seputar kebahagiaan.

Kemenangan ajang kontestasi yang diraih oleh kelompok mayoritas berimplikasi terhadap kemenangan posisi untuk menghegemoni ide-ide kebahagiaan-keadilan itu tidak lain adalah konsep kebahagiaan dari kaum mayoritas yang tentunya kebahagiaan itu berkisar di sekitar kaum mayoritas. Kaum mayoritas selain menerima kemenangan, mereka juga menikmati keuntungan karena menerima dukungan oleh pemerintah.

Antara kaum mayoritas terjalin suatu hubungan simbiosis mutualisme, yang mana di antara kedua individu yang saling berhubungan sama-sama merasakan keuntungan. Pemerintah mendapat banyak dukungan dan merepresi keuntungan mereka, sementara kaum mayoritas mendapat posisi strategis sehingga dapat mempertahankan status mayoritasnya. Kemesraan hubungan antara kelompok mayoritas dan pemerintah yang semakin diperkuat oleh slogan “NKRI Harga Mati” semakin memperkuat hubungan kekuasaan tersebut.

Karena kedua kelompok tadi memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi langkah taktis memperoleh kebahagiaan, sekalipun ide-ide kebahagiaan kelompok mayoritas berhasil merebut hati pemerintah sehingga memiliki leluasa untuk mendistribusikan konsep kebahagiaan itu, namun tetap saja konsep kebahagiaan itu terus berkonflik satu sama lain. Konsep kebahagiaan kaum minoritas berimplikasi kepada semakin mengecilnya ruang gerak kaum minoritas. Di sinilah tindakan intimidasi dimulai. Karena semakin hari kaum minoritas semakin dipersempit ruang geraknya. Keberadaan slogan “NKRI Harga Mati” menjadi bentuk media represi terhadap kemenangan kaum mayoritas, lalu menyeret rakyat agar turut mengikuti mayoritas. Secara bersamaan, fenomena demikian semakin memperkecil ruang gerak kaum minoritas. Ditambah dengan adanya slogan “NKRI Harga Mati”, menghadirkan sejumlah ruang gerak mereka terarah ke pinggiran lalu mengarahkan fokus pada kaum mayoritas.

4.	Zakiyuddin Baidhawiy	Negara Pancasila Negara Syari'ah	Jurnal IAIN Salatiga 2015	Negara Indonesia mempunyai 4 identitas diantaranya pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
5.	Eko A Meinarno dan Sri Fatmawati Mashoedi	Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai- Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraa n	Jurnal Prodi Psikologi Sosial, Universitas Indonesia	Hubungan nilai-nilai pancasila dalam membentuk rasa kewarganegaraan pada setiap remaja karena adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan supaya bisa menerapkan nilai- nilai pancasila di dalam dirinya
6.	Sunoto	Mengenal Filsafat Pancasila	Hanindita Graha Widya, Yogyakarta	Pancasila mempunyai rasa toleransi yang lebih untuk kehidupan

			1995	bernagsa dan bernegara, semakin diyakini sebagai nilai-nilai luhur yang memberikan kebahagiaan hidup
7.	Franz M. Suseno	13 Model Pendekatan Etika	Kanisius, Yogyakarta 1998	Memberikan beberapa teori teori etika dari beberapa tokoh filsafat mulai zaman kuno sampai postmodern
8.	Dina Tsalist Wildana	Intrepetasi simbol “Islam pasti, “NKRI Harga Mati””	Penerbit Universitas Jember 2015	Akulturasi antara berbagai corak budaya dan agama yang dilakukan oleh budayawan dalam kecintaannya terhadap sebuah negara Indonesia
9.	Fathul Mahally	Kebebasan berpikir	Penerbit Universitas	Untuk mengetahui dasar dasar

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana teori-teori tentang Utilitarianism perihal kebahagiaan dari seorang John Stuart Mill dalam menganalisa sebuah permasalahan yang telah diangkat.

Langkah ketiga adalah memahami makna-makna dan istilah-istilah yang dikandung serta pernyataan-pernyataan dari pemikiran John Stuart Mill yang berhubungan dengan permasalahan yang telah diangkat penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Inti dari sebuah karya ilmiah adalah sebuah sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap bab yang telah disajikan. Dikarenakan setiap bab mempunyai pokok pembahasan masing-masing. Adapun sistematika pembahasan tersebut, diantaranya:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan. Dari awal akan dipaparkan sebuah latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu tujuan penelitian dirumuskan dengan jelas lalu dijelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Dan pada akhir bab pertama diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi: Biografi John Stuart Mill, karya-karyanya dan beberapa teorinya serta Biografi dari Louis P. Pojman, karya-karyanya dan teorinya.

Bab ketiga, Mendeskripsikan tentang awal munculnya Slogan “NKRI Harga Mati” serta perkembangannya sampai sekarang dan memaparkan Slogan “NKRI Harga Mati” disaat momen tertentu.

Bab keempat, Berisi tentang analisa data tentang Slogan “NKRI Harga Mati” hasil dari rekontekstualisasi teori Utilitarianisme John Stuart Mill Yang dikritik oleh Teori Objektivisme Louis P. Pojman

Bab Kelima, Sebagai penutup. Bagaimana dari bab sebelumnya telah ditarik kesimpulan dalam penelitian di atas, bertujuan agar pembaca memahami inti dari sebuah penelitian tersebut dan agar mempermudah penelitian selanjutnya. Adapun bagian akhir adalah lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, meliputi: Daftar Pustaka dan daftar riwayat hidup peneliti.

Pada tahun 1823 Mill menyelesaikan pendidikannya dan dipekerjakan oleh East India Company, di mana Ia bertahan sampai tahun 1858. Pada tahun 1856 ia diangkat ke kantor Chief Examiner, jabatan tertinggi kedua di perusahaan, dan dua tahun kemudian menolak pekerjaan pemerintah ketika perusahaan tersebut dibubarkan oleh tindakan parlemen.

Pada tahun 1826, di usia dua puluh, Mill adalah korban dari krisis intelektual. Belakangan dia akan mengingat peristiwa itu sebagai awal kemerdekaan intelektualnya dari Bentham. Dia pernah benar-benar berkomitmen pada utilitarianisme Bentham sehingga itu berfungsi sebagai paham vital. Ia adalah pelajar, murid, dan bahkan penginjil dari iman rasionalistik humanistik ini mendirikan masyarakat utilitarian, mengedit jurnal Bentham. Review menteri Barat, dan memimpin "Radikal Filosofis", organisasi muda Bentham. Tetapi pada usia dua puluh dia menyadari kurangnya emosi dan perasaannya, dia telah menjadi bidak alasan, tanpa kelembutan atau kepekaan. Dia berpaling ke Wordsworth dan Coleridge, penyair romantis yang hebat, untuk bimbingan dalam perasaan yang tanpanya hidup tidak bisa utuh dan terpenuhi.

Pada 1831 Mill bertemu Ny. Harriet Taylor, istri muda seorang pedagang kaya, Dia menjadi teman lemari dan orang kepercayaan. Seiring berlalunya tahun, hubungan platonis semakin dalam dan akhirnya tak lama setelah kematian suaminya pada tahun 1849, keduanya menikah. Pujian Mill untuk kecerdasan, imajinasi, dan kelembutan jiwa Harriet Taylor tidak terbatas dia mengabdikan padanya dan mengakui pengaruhnya

B. Karya-karya John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan tokoh yang dikenal dengan penulis yang sangat produktif. Mill juga sering meriview ulang tulisan-tulisan dari pelopor teori utilitarianisme, seperti Jeremy Bentham. Dalam karyanya Mill mempunyai banyak tulisan seperti buku, esai artikel dan sebagainya. Akan tetapi disini penulis hanya memaparkan beberapa karya-karya Mill yang sangat populer pada waktu itu.

1. *On liberty* (Perihal Kebebasan), 1859
2. *Utilitarianism* (Tentang teori etika dalam mencapai kebahagiaan), 1861
3. *The Subjection of Women* (Essay tentang filsafat dan ekonomi politik), 1869
4. *Principles of Political Economy* (Buku teks ekonomi atau ekonomi politik paling penting pada pertengahan abad ke-19), 1848
5. *System of Logic Ratiocinative and Inductive* (Buku yang merumuskan lima prinsip penalaran induktif yang dikenal sebagai metode Mill), 1843
6. *Essay on Some Unsettled Questions of Political Economy* (Essai tentang beberapa pertanyaan ekonomi politik yang tidak diselesaikan adalah risalah tentang ekonomi politik John Stuart Mill), 1844
7. *Three Essay on Reliigion*, 1874
8. *Chapters on Socialism*, 1879

Daya tarik kedua pada paham Utilitarian adalah konsep moral ini juga memijakkan kaki pada konsekuensialisme. Dengan konsekuensialisme para tokoh yang berada di bawah garda utilitarian berhasil berpaling dari anggapan moralitas kuno yang berafiliasi dengan segala unsur-unsur metafisik, lalu terganti dengan argumen rasional seperti pertimbangan dan analisis terkait hasil baik maupun buruk sebagai konsekuensi logis jika suatu tindakan dilakukan. Konsekuensialisme meminta setiap orang yang mengancam sesuatu sebagai salah secara moral harus menunjukkan siapa yang salah, apa alasan sesuatu dapat dikatakan salah dan dampak negatif dari justifikasi sesuatu dikatakan salah, sehingga justifikasi tersebut dapat benar-benar terbukti letak kesalahannya. Begitupun sebaliknya, sesuatu dapat dikatakan baik dalam pandangan Utilitarian jika membawa kehidupan seseorang menjadi baik.

Tampak konsekuensialisme menjadi perangkat metodologis bagi utilitarian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan moral. Utilitarian berangkat dari usaha menemukan jawaban yang secara moral benar, di mana kebenaran itu diukur dengan pertimbangan-pertimbangan rasional demi tercapainya perubahan-perubahan dalam kesejahteraan manusia, bukan perkara berangkat dari konsultasi dengan para pemimpin agama atau menyandarkan pada tradisi-tradisi yang tidak jelas. Bisa dikatakan, utilitarianisme merupakan pandangan moral-etis yang sangat progresif. Utilitarianisme menuntut bahwa bahwa berbagai kebiasaan atau otoritas yang telah menindas manusia selama berabad-abad diuji di hadapan

standar kemajuan manusia. Di sisi lain, utilitarianisme merupakan senjata ampuh untuk menantang prasangka dan tahayul, memberikan standar dan prosedur yang menantang mereka yang mengklaim wewenang terhadap kita atas nama moralitas.

Secara umum, ini menekankan prinsip utilitas bahwa manusia harus pindah ke hasil yang baik dari mereka yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jadi, di antara semua tindakan yang bisa kita ambil yang benar adalah tindakan yang bisa kita lakukan demi kepentingan semua orang yang bisa kita pengaruhi. Misalnya, kita bisa berbohong. Menurut moral tradisional, berbohong tidak diperbolehkan. Utilitarianisme tidak menerima pendapat itu. Baginya berbohong hanya dilarang karena konsekuensinya lebih buruk daripada konsekuensi jika orang mengatakan kebenaran. Jika hasil kebohongan akan lebih baik daripada kebenaran, kita mungkin, mungkin wajib, berbohong. Utilitarianisme disebut universal, karena ia menjadi norma moral yang dihasilkan oleh orang yang diasuransikan dan disetujui sebagai hasilnya-baik di seluruh dunia. Utilitarisme membutuhkan perhatian untuk semua yang terlibat dalam tindakan, termasuk kepentingan tertanggung itu sendiri. Berbeda dengan sifat mementingkan diri sendiri, utilitarianisme etis membenarkan pentingnya kepentingan diri sendiri atau kesenangan orang lain dapat dianggap sebagai tindakan moral yang tinggi.

Utilitarianisme tidak bekerja dengan aturan, itu tidak masalah karena memberi, dan menuntut yang diberikan, ia memutuskan dialog dan

argumentasi. Orang dapat melihat semua aspek yang relevan terlebih dahulu, kemudian mereka akan membuat keputusan. Dan karena perspektifnya tidak egois, universal, berwawasan luas, intrinsik, sosial. Jadi, Utilitarian memiliki hak untuk moralitas manusia sebagai makhluk sosial. Pemanfaatan atmosfer pertanggungjawaban keputusan, sikap dan tindakan moral yang tidak sesuai dengan aturan abstrak, perlu dipertanggungjawabkan dari hasil penelitian untuk semua pihak yang terlibat.

Jelas itu adalah prinsip berkualitas tinggi. Yang dapat disetujui, karena itu adalah kesimpulan dari apa yang harus kita pertanggungjawabkan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral paling mendasar, yaitu tentang siapa kita harus selalu mengambil sikap yang baik. Apakah hanya ada utilitarianisme yang cukup sebagai satu-satunya prinsip etika? Apakah kita selalu setuju untuk disetujui sesuai dengan prinsip itu?

Terminologi lain yang sering disematkan pada utilitarian sebagai pendekatannya selain konsekuensialisme adalah altruistik-komunitarian. Esensi dari nilai-nilai moral dalam pendekatan altruistik dan komunitarian berarti bahwa sifat dari nilai tindakan manusia dibangun dan didasarkan pada hubungan komunitarian atau hubungan kehadiran dengan orang lain. Yaitu, dalam pendekatan ini, kebersamaan atau kebersamaan dengan orang lain memberikan tindakan moral yang baik atau buruk.

Apa yang dimaksud dengan kebersamaan di sini, adalah dalam arti yang dalam dan luas kehadiran orang lain sebelum kita menghasilkan

nilai-nilai etis. Orang sering diingatkan dan terinspirasi oleh kehadiran orang lain dalam gagasan etika dan segala sesuatu yang mengambil bagian di dalamnya. Dalam arti yang lebih sempit, kita bisa melihat dalam bentuk opini sosial/masyarakat. Kita sering mendorong dan membimbing orang untuk bertindak atau tidak bertindak. Sebagai contoh, adalah opini publik luas yang menegaskan bahwa seorang putra dan seorang PKI tidak dapat mengajar filsafat di sebuah universitas. Masyarakat mengatakan tidak diizinkan untuk kegiatan ini. Dan, itu tidak mengalir dan mengekspresikan nilai-nilai moral. Masalahnya di sini adalah apakah nilai moral tergantung pada apa yang menjadi opini publik atau apakah ada landasan lain?

Kita juga sering dihadapkan pada masalah etika yang lagi-lagi karena pandangan masyarakat menampilkan keadilan bukan lagi hal yang tabu. Contoh nyata dalam memilih pasangan hidup. Puluhan tahun lalu, orang tidak bebas dalam memilih pasangan. Pasangan hidup seringkali menjadi pilihan orang tua atau keluarga. Saat ini, hal-hal seperti itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Contoh lain dapat disebutkan dalam kaitannya dengan keluarga berencana. Berbagai jenis teknik keluarga berencana sebelumnya tabu karena banyak alasan moral. Saat ini hampir sulit untuk menemukan orang yang mempertimbangkan semuanya dalam memilih metode keluarga berencana.

Nilai-nilai moral merupakan produk dari pendekatan komunitarian seringkali meminta penegasan serius. Sama halnya kehadiran orang lain menghasilkan nilai-nilai moral, Immanuel Levinas memiliki ide yang patut

seharusnya dua pengertian ini sangat penting. Dua contoh bisa menjelaskan maksudnya. *Pertama*, sebuah kasus sadisme (kelainan jiwa di mana orang memperoleh kesenangan dengan membuat orang lain menderita). Andaikan saja, seseorang disiksa sampai mati di hadapan ribuan orang pengidap sadistis yang merasa senang sekali dengan adegan di depan mata mereka. Kalau begitu, kesenangan para sadis jauh lebih besar daripada ketidaksenangan orang malang yang disiksa itu. Jika utilitarianisme konsisten dalam pemikirannya, teori ini harus menyimpulkan bahwa perbuatan penyiksaan itu baik secara moral. Namun, siapa dapat menerima kesimpulan demikian? Tanpa ragu-ragu kita akan menegaskan bahwa perbuatan itu sangat etis, karena melanggar hak seseorang untuk tidak disakiti dan haknya untuk hidup.

Contoh kedua juga bisa disetarakan dengan status contoh pertama. Andaikan saja ada masyarakat di mana mayoritas besar penduduk hidup makmur dan sejahtera di samping minoritas kecil yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami serba macam kekurangan. Jika utilitarianisme konsisten, ia harus mengatakan bahwa keadaan masyarakat itu perlu dinilai baik secara moral, karena di situ kesenangan jauh melebihi ketidaksejahteraan. Namun, utilitarianisme mengatakan sama sekali masalah keadilan sosial yang melanda masyarakat itu dan semua akan setuju bahwa hal itu merupakan masalah etis yang sangat penting.

Kritik terhadap utilitarianisme perbuatan ini tentu berat sekali, bahkan menghancurkan. Sebab, apa artinya sebuah teori etika yang tidak bisa

menampung pengertian etis yang begitu fundamental seperti hak dan keadilan? Dalam usaha mengatasi kesulitan-kesulitan ini timbul utilitarianisme aturan. Menurut utilitarianisme dalam bentuk baru ini prinsip kegunaan tidak harus diterapkan pada perbuatan, melainkan pada aturan yang berlaku untuk perbuatan. Dengan cara ini hak dan keadilan mendapat tempat dalam pemikiran utilitarian karena kita banyak menerapkan prinsip kegunaan atas aturan-aturan mengenai hak dan keadilan. Misalnya, aturan mana dari kedua aturan bertentangan membawa *the greatest happiness of the greatest number*, “hak asasi manusia harus dihormati atau hak asasi manusia tidak perlu dihormati?” Jika diukur menggunakan prinsip kegunaan, sudah jelas jika aturan pertama pantas dipilih. Sebab, seandainya dipilih aturan kedua, akan timbul keadaan masyarakat yang kacau tak karuan. Jika HAM tidak perlu dihormati, hal itu berarti tidak perlu lagi ada kepastian tentang harta benda.

Adanya utilitarianisme aturan tentu membawa angin segar baru terhadap teori utilitarian. Bentuk baru utilitarian terakhir ini membuat teori utilitarianisme dapat terus hidup dan survive mengikuti dinamika zaman yang terus berkembang. Pada sisi lain, utilitarianisme aturan juga berhasil menyelamatkan utilitarianisme konvensional dalam mengatasi kesulitan yang melekat padanya.

3. Kelemahan Utilitarianisme

Dianalogikan sebagai kasus pemerintah kota ingin membangun jalan layang untuk mengatasi kemacetan total yang terjadi dua kali

sehari di jalan arteri. Namun untuk itu sebuah desa harus digusur. Lalu timbul pertanyaan, dengan dana terbatas, apakah cukup bagi penduduk desa untuk mendapatkan kompensasi yang sangat sedikit? Bagaimana seharusnya pertanyaan dijawab jika kita menggunakan prinsip utilitarianisme untuk itu?

Utilitarianisme akan mempertimbangkan dua alternatif, yaitu: menerapkan penggusuran (1) dengan memberikan hampir tidak ada kompensasi, atau (2) dengan memberikan kompensasi yang disepakati oleh mereka yang terkena dampak penggusuran sebagai memadai. Keunggulan alternatif (1) adalah kelancaran arus lalu lintas yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh semua kendaraan yang melewati kota, dan karena kendaraan tersebut sebagian besar bergerak untuk berbagai kepentingan ekonomi yang mempengaruhi banyak orang, manfaatnya sangat luas. Meskipun hanya beberapa keluarga yang kehilangan nyawa mereka. Dalam alternatif (2) keuntungan adalah bagian dari keluarga, sedangkan masyarakat luas kehilangan karena atau proyek harus ditunda terlebih dahulu karena dana untuk kompensasi belum ada, atau karena proyek menyerap begitu banyak uang untuk proyek lain yang juga penting bagi kehidupan ekonomi tidak dapat diimplementasikan. Jelas bahwa keuntungan dan kerugian dalam alternatif (1) jauh lebih positif daripada di alternatif (2). Sesuai dengan prinsip utilitas, kita dapat menggusur beberapa keluarga ini, karena kerugian yang mereka derita jauh

diimbangi dengan manfaat yang akan dinikmati oleh kebanyakan orang. Namun, kita semua akan bertanya: Apakah itu adil? Apakah adil bagi beberapa keluarga sederhana untuk menjadi korban demi keuntungan ekonomi anggota masyarakat lainnya?

Pertanyaan yang sama muncul ketika alokasi bantuan untuk masyarakat hanya dilakukan jika manfaat yang diharapkan akan tercapai. Pengalaman dan ekonomi mengajarkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam bisnis dengan modal besar menghasilkan lebih banyak modal daripada jika modal yang sama diinvestasikan dalam beberapa bisnis modal kecil. Jadi, jika kita menggunakan prinsip memanfaatkan bantuan bisnis, pemerintah harus menyediakan dana yang tersedia untuk petani yang sudah memiliki pembeli yang besar, karena mereka akan dapat mengembalikan modal lebih cepat (menghasilkan hasil yang lebih baik) daripada jika dana yang sama dibagi dengan petani. Tetapi apakah itu adil? Pertanyaannya membuka kelemahan fatal dari setiap bentuk pemanfaatan: utilitas tidak dapat menjamin keadilan. Demikian juga, utilitas tidak dapat menjamin hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia.

Mungkin bagi seluruh komunitas akan lebih bermanfaat jika setiap perampok ditembak mati, kemungkinan bahwa begitu dia keluar dari penjara, dia akan hidup kembali dari noda. Tetapi apakah itu adil? Bukankah hukumannya harus sesuai dengan aksinya? bukankah perampok memiliki hak atas keadilan, untuk melanjutkan ke

menggugat jika pengertian hak dan keadilan menjadi tidak relevan untuk utilitarianisme perbuatan, padahal untuk setiap teori etika yang serius seharusnya dua pengertian ini sangat penting.

Sentralitas pemikiran Mill terhadap kebahagiaan mayoritas pada akhirnya mendatangkan kritik yang berpihak pada minoritas. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar hal tersebut pun tak dapat dibendung. Jika setiap warga negara memiliki hak kebebasan, bersuara dan berekspresi serta bisa memiliki jaminan rasa aman, kebahagiaan dan kesejahteraan, kenapa harus kaum minoritas menuruti kehendak kepada kaum mayoritas? Jika setiap negara memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan dan mengekspresikan kebahagiaan, kenapa pula dalam rangka memilih kebahagiaan kaum minoritas mengorbankan ekspresi tersebut atas nama mayoritas? Pertanyaan-pernyataan demikian menelanjangi pemikiran utilitarian yang terlihat anggun pada masanya, namun mendatangkan kritik tajam pada masa setelahnya. Salah satu kritik yang diutarakan kepada utilitarian lalu menyatakan sikap keberpihakannya kepada kaum minoritas adalah Louis Paul Pojman.

Pojman juga seorang Sarjana tamu di Brigham Young, Universitas California, Berkeley dan Universitas New York. Baru-baru ini Pojman pensiun sebagai Profesor Filsafat dari akadeisi militer Amerika Serikat di West Point, di mana Pojman adalah seorang profesor selama sembilan tahun. Pojman telah membaca makalah di 60 Universitas di AS, Eropa dan Asia. Pojman adalah penulis dan editor banyak buku dan artikel. Pojman terkenal karena menghadirkan perspektif yang sangat seimbang dalam tulisannya tentang berbagai isu kontemporer yang paling kontroversial dan menantang, termasuk aborsi, tindakan afirmatif, dan hukuman mati. Pojman berusaha menjelaskan mengapa orang tidak setuju pada masalah-masalah seperti itu dan mempresentasikan akar dari ide, ajaran dan tulisan yang membantu dan membangun pemahaman tentang sudut pandang yang berbeda sehingga pembaca dapat merefleksikan sudut pandangnya sendiri tentang berbagai masalah. Dalam bukunya yang pertama, *Logik Subjektivitas*, Pojman berpendapat bahwa logika agurmen Kierkegaard mengarah pada arah kontradksi internal. Dalam *Relief and The Will* Pojman menentang orang-orang seperti Descartes dan Wiliam James yang berpendapat bahwa kita dapat memilih kepercayaan kita melalui surat wasiat. Pojman juga mengembangkan etika keyainan dan berpendapat bahwa hrapan dapat berfungsi sebagai pengganti yang cocok untuk keyakinan agama. Karyanya yang terakhir adalah membela kosmopolitanise dengan alasan

sebuah subyektif akan kita paparkan disini karena akan membandingkan sebuah nilai dan fakta. Sehingga kami memberikan sebuah gambaran bahwa tanpa adanya sebuah subjek moral, norma moral tidak akan mempunyai makna apapun, sama seperti halnya petunjuk jalan tidak mempunyai makna jika tanpa adanya pemakai jalan. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa norma moral selalu mempunyai konotasi subjektif.

Kalau kita sangat setuju bahwa norma moral bersifat absolut, maka norma itu juga bersifat universal. Artinya, selalu berlaku dimana pun berada. Sangat mustahil kalau norma moral berlaku disuatu tempat akan tetapi ditempat lain tidak berlaku. Hal itu akan sangat dapat terjadi kalau norma hukum ditempat satu dengan tempat lain berbeda. Norma moral itu sangat berlaku terhadap sebuah objektivitas moral.

Prinsip-prinsip yang akan memenuhi kebutuhan manusia yang esensial dan mengedapankan kepentingan manusia yang paling signifikan secara optimal dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip moral yang valid secara objektif. Oleh karena itu ada sifat manusia yang sama, ada seperangkat prinsip moral yang berlaku secara objektif, yang berlaku untuk seluruh umat manusia.

Konsepsi moral objektivisme dilandasi pada sebuah asumsi mendasar jika manusia memiliki sifat yang relatif sama dalam hal esensial. Asumsi ini kemudian mengantar kepada sebuah pemahaman prinsipil, setiap sesuatu yang mengantar kepada pemenuhan esensial manusia secara optimal merupakan prinsip moral yang valid secara objektif. Dari sini

Revolusi industri sendiri lahir di daratan benua Eropa, tepatnya Inggris dan Prancis. Bagi mereka para pemilik modal atau biasa disebut sebagai kaum borjuis, kehadiran teknologi mesin uap tentu memiliki signifikansi besar untuk meningkatkan produktivitas. Adanya borjuis lain yang sama-sama bergerak pada sektor perdagangan yang menjual komoditas yang sama, dalam hal ini adalah tekstil, membuat beberapa kalangan borjuis saling berlomba-lomba meningkatkan produktivitas komoditi. Kemenangan di ajang kompetisi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat menguasai pasar. Semakin besar suatu borjuis menguasai pasar, semakin besar pula mereka meraup keuntungan. Kuatnya persaingan yang mewarnai kalangan borjuis berimplikasi pada produktivitas komoditi. Mereka mencoba memperbanyak suatu produk secara efisien, cepat, serta hemat biaya. Kesemua hal inilah yang kemudian membuat para borjuis memutar otak sekiranya beberapa hal tadi dapat dicapai di tengah arus persaingan ketat antara sesama borjuis.

Pada akhirnya, penguasaan pasar pun dilakukan dengan cara memproduksi suatu produk dengan skala besar. Agar terhindar dari kerugian atau meminimalisir pengeluaran, maka kaum borjuis mengupayakan suatu cara di mana tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Dari sinilah problematika realita sosial dimulai. Sebelum umat manusia kedatangan tamu berupa teknologi bernama mesin uap, banyak manusia mengantungkan hidupnya bekerja pada bidang home industri. Kemunculan mesin tenaga uap terpaksa membuat para home industri

gulung tikar. Pada titik di mana mereka tidak memiliki apapun untuk melakukan aktivitas produksi, disebabkan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari telah tercerabut oleh mesin uap, maka yang mereka miliki hanyalah tenaga yang terpaksa mereka jual kepada kaum borjuis.

Persaingan antar kelompok borjuis tidak hanya berhenti pada tataran menggantikan tenaga manusia dengan mesin uap. Kuatnya persaingan antara satu sama lain melumpuhkan sifat kemanusiaan dalam diri seorang borjuis. Kegiatan produksi tidak lagi didasarkan atas demi tercukupinya kemaslahatan dan kesejahteraan. Lebih jauh, ketidakpuasan dan hasrat untuk mendapat keuntungan sebanyak mungkin menjadi motivasi dan membuat mereka terjurumus kepada lubang eksploitasi kepada kelas pekerja. Bila diurai lebih padat dan singkat, manusia yang menapaki posisi di tataran pekerja setidaknya memiliki kerugian dua hal. *Pertama*, akibat adanya mesin tenaga uap membuat mereka gulung tikar dari pemenuhan hidup sehari-hari dengan cara home industri. Fenomena ini sekaligus mengantar pada mereka untuk menjual tenaganya kepada kaum borjuis. Sialnya, banyaknya tenaga manusia yang harus ditampung tidak sebanding dengan pengeluaran kaum borjuis untuk menggaji mereka. Ditambah dengan adanya mesin tenaga uap, membuat tenaga manusia tidak lagi banyak dibutuhkan. Terpaksalah mereka menjual diri mereka dengan upah relatif rendah. Bagi mereka yang ditolak oleh perusahaan industri, mereka menjadi pengangguran jika tidak gelandangan. *Kedua*,

memasuki industri sama halnya seperti memasuki sistem borjuisme. Konsekuensinya, mereka mau tidak mau harus mematuhi apa yang diperintah oleh atasan mereka. Di sinilah kaum borjuis mulai memeras jerih payah hasil keringat kaum pekerja. Mereka mengeksploitasi dengan cara menambah jam kerja, namun tidak ada gaji selama waktu tambahan itu berlangsung.

Periode revolusi industri kedua berlangsung sekitar tahun 1900-an atau pada awal abad ke dua puluh. Jika revolusi industri 1.0 memusatkan perhatian pada industri teknologi berbasis tenaga uap, revolusi industri 2.0 menunjukkan karakteristik industri utamanya yang berbasis sirkulasi aliran listrik. Thomas Alfa Edison adalah figur yang sangat berjasa dalam membidani kelahiran revolusi industri 2.0 berbasis listrik.

Pada revolusi industri 3.0, secara perlahan tenaga manusia hampir sepenuhnya mulai tidak lagi dibutuhkan dalam arus mainstrem industrialisasi. Tenaga-tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia mulai mengalami kemajuan pesat apalagi setelah dunia menemukan komputer dan menghasilkan internet. Kedua hal ini menjadi motor penggerak sekaligus monitoring otomatis dari jarak jauh. Kemampuan monitoring pekerjaan menggunakan komputer dan internet yang memiliki kemampuan menggerakkan mesin dari jarak jauh tentu berkonsekuensi terhadap menurunnya angka tenaga manusia di sektor industrialisasi. Era

Kelugasan serta ketegasan bahasa mempengaruhi psikis para pendengar untuk mengajak mereka bergabung mendedikasikan kepada negara. Namun, di sisi lain, ternyata slogan ini menyimpan sejumlah kuasa yang kasat mata seperti pertentangan antara dua kubu yang saling bertarung antara kubu mayoritas dan minoritas.

Pada perkembangan teknologi zaman sekarang sudah mulai adanya peningkatan secara drastis pengaruh terhadap sebuah kedaulatan sebuah negara. Akan tetapi, pengaruh teknologi kini bukan menjadi satu permasalahan besar yang dihadapi oleh sebuah rakyat Indonesia. Permasalahan yang telah dihadapi oleh sebuah masyarakat Indonesia kini adalah sebuah dilematisasi akan sebuah proses sistemisasi proses demokrasi yang makin tahun makin rumit. Sehingga mengakibatkan kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lunturnya sebuah rasa kecintaan terhadap sebuah negara membuat pertanyaan timbul, apakah yang melatar belakangi sebuah permasalahan itu sehingga rasa kecintaannya terhadap sebuah negara menurun drastis sehingga menyebabkan permasalahan secara individual ataupun kelompok terjadi?

Sebuah Slogan muncul yang dipelopori oleh seorang tokoh atau ulama kharismatik dari kalangan Nahdatul Ulama bernama MoeSlim Rifa'i Imampuro atau sering dikenal dengan panggilan Mbah Liem. Mbah Liem merupakan pemimpin dari satu pesantren yang berada di di Klaten yaitu Pondok pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti. Mbah liem mencetuskan

Slogan tersebut bukan sekedar mencari sensasi belaka untuk mencari sebuah popularitas. Akan tetapi, Mbah Liem mencetuskan Slogan tersebut adalah dikarenakan dalam pandangannya, menurunya secara drastis sebuah rasa Nasionalisme masyarakat terhadap bangsa dan negaranya. Sehingga tokoh ulama ini menggaung-gaungkan sebuah slogan “NKRI Harga Mati” agar diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Karena sebuah rasa Nasionalisme yang sangat tinggi merupakan sebuah peninggalan seorang para pendiri bangsa yang sampai mati-matian dalam memperjuangkan negara Indonesia ini. Kita harus menjadi generasi sebuah penerus bangsa yang mempunyai rasa kecintaan lebih terhadap sebuah bangsa, karena permasalahan hebat tiap tahun akan sangat lebih kejam dari masa ataupun sebelumnya. Maka dari itu kita harus kuat dalam mengamalkan sebuah slogan tersebut secara sungguh-sungguh. Pancasila lah yang menjadikan sebuah landasan dalam sebuah berideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu dasar negara selain pancasila tidak dapat digunakan atau diterapkan di ruang lingkup bangsa Indonesia. Di pondok pesantren Al-Muttaqien di mana Mbah Liem memimpin, para santri diwajibkan mengikuti sebuah upacara bendera. Dan berbagai acara apapun yang dilaksanakan ruang lingkup pesantren tidak lupa juga selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa Nasionalismenya.

Mbah Liem juga menitipkan kepada seluruh santrinya agar menghafal Pancasila dan UUD 1945. Dan ketika selesai sholat agar tidak

pendirian yang kuat terhadap kewajibannya dalam kesetia kawan. sila keempat dapat diketahui mempunyai nilai tanggung jawab dan harmoni yang dimaksud adalah mendasari sebuah warga masyarakat untuk dapat mengerti dan menerima keputusan yang diambil penguasa dan sila kelima mempunyai nilai persahabatan dan rasa keadilan untuk warga negaranya. Dari kelima sub nilai pancasila tersebut diketahui bahwa landasan sebuah ideologi negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara.

“NKRI Harga Mati” dalam pandangan generasi milenial kini mampu bisa memberikan rasa kepercayaan kepada masa depan bangsa agar tidak terjadi carut marut yang dapat mengantarkan dalam sebuah perpecahan sehingga timbulnya kekerasan. Lamban laun kemudian sebuah Slogan “NKRI Harga Mati” bukan hanya menjadi sebuah wacana ataupun gaungan yang dibuat untuk sebagai semangat untuk menciptakan rasa Nasionalisme terhadap negara. Akan tetapi sebuah Slogan ini dijadikan sebuah ideologi gambaran yang digunakan para pemimpin negara dalam sebuah kontestasi sebuah demokrasi. Hal yang sangat baik juga sebenarnya dalam wacananya untuk memberikan semangat yang lebih tinggi dalam memberikan stimulus agar kecintaannya terhadap negara tidak luntur. Para elit bangsa pun juga menjadikan slogan ini tidak jauh dengan yang namanya sebuah ideologi negara yaitu pancasila. Nilai sosial yang diberikan dalam Slogan tersebut memberikan rasa akan kedamaian yang diberikan jika bisa mengamalkan dalam ruang publik dimasa kini. Bahwa slogan tersebut sebenarnya juga memberikan efek buruk pula jika

orang-orang di masa kini yang mempunyai pemikiran tersendiri dalam ideologi bernegara.

Hal yang patut dijadikan titik berat bahwa yang menjadikan hal buruk itu adalah bahwa ideologi yang sebenarnya baik semata-mata dinilai buruk dalam mengamalkan kehidupan berbangsa dan negara. Slogan “NKRI Harga Mati” pada zaman setelah di gaungkan oleh Mbah Liem, sebenarnya memberikan efek baik dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dimasa itu. Seiring dengan berjalannya waktu bahwa sebuah slogan tersebut juga adanya penolakan oleh orang-orang tertentu atau penulis memberikan sebuah nama kaum minoritas yang merasa tidak adanya sebuah keadilan ataupun kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari itu kaum minoritas menilai bahwa slogan tersebut tidak bisa dijadikan sebuah panutan dalam melakukan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hanya kaum mayoritas yang pro terhadap pemerintah yang menggunakan slogan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya penulis bertanya tanya dan mencari sebuah permasalahan itu ada apa dengan slogan tersebut dengan kaitannya dalam bermasyarakat? Slogan tersebut sebenarnya dijadikan warga negara untuk mendapatkan sebuah hak nya oleh penguasa jika mengamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi bertolak belakang dengan kaum yang tidak mengamalkan slogan tersebut sehingga tidak didapatkan secara utuh hak yang diperoleh. Sehingga penulis mengangkat sebuah permasalahan ini dan dijadikan objek dalam

memiliki komitmen, pemikiran, langkah dan cara tersendiri untuk mencapai kebahagiaan bersama apalagi kebahagiaan itu terarahkan pada kontestasi mencapai kebahagiaan dalam bentuk keadilan yang dinahkodai oleh negara. Keduanya sama-sama berangkat dari kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap partisipasi stabilitas keamanan, kesejahteraan, yang lagi-lagi tidak bisa terlepas demi tercapainya nilai-nilai keadilan. Hanya saja, perbedaan di antara kedua kelompok tadi terletak pada langkah taktis dalam merealisasikan ide masing-masing. Kelompok pertama mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dicapai tanpa harus mengganti sistem pemerintahan. Adapun kelompok kedua lebih menekankan kepada usaha reformasi secara besar-besaran hingga pada ranah radikal seperti sistem pemerintahan, kenegaraan dan perundang-undangan.

Pada kelompok terakhir mereka selalu dipandang sebelah mata. Banyak sekali justifikasi miring yang disematkan kepadanya mulai dari kelompok radikal, pengkhianat bahkan pemberontak. Seakan-akan mereka merupakan kaum yang harus dihadapi dengan palu dan gadah, bukan dengan semangat kebinekaan dalam menyikapi perbedaan. Sebagai negara yang berazaskan Pancasila dengan slogan utamanya ialah Bhinneka Tunggal Ika, tentu menjadi suatu tindakan paradoks jika mereka dinilai sebagai kaum yang selalu mengarah kepada keburukan, dari pada dipandang dari sisi kemanusiaan seperti introspeksi menyikapi fenomena

Pada dasarnya, baik kelompok mayoritas maupun minoritas memiliki komitmen, pemikiran, langkah dan cara tersendiri untuk mencapai kebahagiaan bersama apalagi kebahagiaan itu terarahkan pada kontestasi mencapai kebahagiaan dalam bentuk keadilan yang dinahkodai oleh negara. Keduanya sama-sama berangkat dari kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap partisipasi stabilitas keamanan, kesejahteraan, yang lagi-lagi tidak bisa terlepas demi tercapainya nilai-nilai keadilan. Hanya saja, perbedaan di antara kedua kelompok tadi terletak pada langkah taktis dalam merealisasikan ide masing-masing. Kelompok pertama mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dicapai tanpa harus mengganti sistem pemerintahan. Adapun kelompok kedua lebih menekankan kepada usaha reformasi secara besar-besaran hingga pada ranah radikal seperti sistem pemerintahan, kenegaraan dan perundang-undangan.

Pada kelompok terakhir mereka selalu dipandang sebelah mata. Banyak sekali justifikasi miring yang disematkan kepadanya mulai dari kelompok radikal, pengkhianat bahkan pemberontak. Seakan-akan mereka merupakan kaum yang harus dihadapi dengan palu dan gadah, bukan dengan semangat kebinekaan dalam menyikapi perbedaan. Sebagai negara yang berazaskan Pancasila dengan slogan utamanya ialah Bhinneka Tunggal Ika, tentu menjadi suatu tindakan paradoks jika mereka dinilai sebagai kaum yang selalu mengarah kepada keburukan, dari pada dipandang dari sisi kemanusiaan seperti introspeksi menyikapi fenomena

tersebut sebagai kekecewaan kurang maksimal atau ketakseriusan pemerintah dalam mengemban amanah kedaulatan rakyat.

Lalu, adanya slogan “NKRI Harga Mati” semakin memperkeruh keadaan. Slogan ini semakin menarik simpati masyarakat luas agar berpihak kepada kaum mayoritas, yang secara bersamaan menuai antipati kepada kaum minoritas. Konsekuensinya, mereka selalu dipandang dengan stigma negatif daripada manusia biasa yang memiliki rasa kekecewaan jika pemimpinnya telah gagal dalam mengemban amanah kedaulatan rakyat.

Kemenangan ajang kontestasi yang diraih oleh kelompok mayoritas berimplikasi terhadap kemenangan posisi untuk merepresi ide-ide kebahagiaan-keadilan itu tidak lain adalah konsep kebahagiaan dari kaum mayoritas yang tentunya kebahagiaan itu berkisar di sekitar kaum mayoritas. Kaum mayoritas selain menerima kemenangan, mereka juga menikmati keuntungan karena menerima dukungan oleh pemerintah. Antara kaum mayoritas terjalin suatu hubungan simbiosis mutualisme, yang mana di antara kedua individu yang saling berhubungan sama-sama merasakan keuntungan. Pemerintah mendapat banyak dukungan dan merepresi keuntungan mereka, sementara kaum mayoritas mendapat posisi strategis sehingga dapat mempertahankan status mayoritasnya. Kemesraan hubungan antara kelompok mayoritas dan pemerintah yang semakin diperkuat oleh slogan “NKRI Harga Mati” semakin memperkuat hubungan kekuasaan tersebut.

Karena kedua kelompok tadi memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi langkah taktis memperoleh kebahagiaan, sekalipun ide-ide kebahagiaan kelompok mayoritas berhasil merebut hati pemerintah sehingga memiliki leluasa untuk mendistribusikan konsep kebahagiaan itu, namun tetap saja konsep kebahagiaan itu terus berkonflik satu sama lain. Konsep kebahagiaan kaum minoritas berimplikasi kepada semakin mengecilnya ruang gerak kaum minoritas. Di sinilah tindakan intimidasi dimulai. Karena semakin hari kaum minoritas semakin dipersempit ruang geraknya. Keberadaan slogan “NKRI Harga Mati” menjadi bentuk media represi terhadap kemenangan kaum mayoritas, lalu menyeret rakyat agar turut mengikuti mayoritas. Secara bersamaan, fenomena demikian semakin memperkecil ruang gerak kaum minoritas. Ditambah dengan adanya slogan “NKRI Harga Mati”, menghadirkan sejumlah ruang gerak mereka terarah ke pinggir lalu mengarahkan fokus pada kaum mayoritas.

2. Pandangan Mill Dalam Pertentangan Mayoritas dan Minoritas

Kasus fenomena represi mayoritas terhadap minoritas bukan lagi pembahasan baru dalam kajian teori keadilan. Di kisaran abad ke sembilan belas lalu, muncul seorang filsuf yang mengorientasikan pemikirannya terhadap dasar-dasar etika, John Stuart Mill. Pemikiran Mill yang bernaung di bawah panji utilitarianisme yang banyak membahas dasar-dasar etika dan politik menjadi sebuah dasar teori keadilan di kemudian hari. Menurut John Rawls, utilitarianisme berarti pandangan yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan merupakan prinsip yang paling benar

3. Kritik Louis Pojman Terhadap Mill

Sangat jelas jika bangunan teori Mill lebih terarah pada mayoritas dan cenderung melupakan minoritas. Mayoritas dipandang sebagai representatif terhadap kebahagiaan. Di hari kemudian, salah seorang ilmuwan bernama Louis P. Pojman yang juga mencurahkan pemikirannya dalam bidang teori keadilan melayangkan keberatannya terhadap Mill. Pemikirannya kemudian dikenal sebagai objektivisme, yang lahir dari reaksi utilitarianisme Mill yang lebih berpihak pada mayoritas atas dasar anggapan bahwa, untuk bertindak secara etis berarti berusaha menghasilkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang.

Teori keadilan yang digagas oleh Louis P. Pojman melalui paham objektivisme berusaha mengakomodir distribusi kebahagiaan untuk kalangan kaum minoritas. Tidak seperti Mill di mana mayoritas menjadi titik keterarahan utilitarian, lalu memusatkan titik fokus pemikiran untuk kaum mayoritas, satu sisi teori keadilan objektivisme bertujuan mengkritik utilitarianisme. Pada sisi-sisi yang lain, objektivisme berusaha menyempurnakan teori utilitarian karena teori ini berusaha mendistribusikan keadilan secara merata sehingga tidak berputar di lingkup kalangan mayoritas. Adapun tujuan dari teori objektivisme ialah berusaha mendistribusikan keadilan sehingga tersebar serta dapat dinikmati oleh kedua belah pihak baik mayoritas maupun minoritas.

Berangkat dari konsepsi moral objektivisme yang dilandasi pada sebuah asumsi mendasar jika manusia memiliki sifat yang relatif sama dalam hal esensial. Asumsi ini kemudian mengantar kepada sebuah pemahaman prinsipil, setiap sesuatu yang mengantar kepada pemenuhan esensial manusia secara optimal merupakan prinsip moral yang valid secara objektif. Dari sini tampak ada kedekatan korelasi antara objektivisme dengan utilitarianisme. Kedekatan itu berlokus pada optimalisasi terhadap segala hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sekaligus nantinya akan menjadi beberapa prinsip moralitas. Hanya saja, jika pembahasan beralih kepada ranah operasional, di sana akan cukup kentara terdapat suatu perbedaan antara objektivisme dan utilitarianisme. Objektivisme mendasarkan optimalisasi kepada kebahagiaan dalam aspek esensial setiap manusia. Sementara utilitarianisme dilihat dari sudut operasional berorientasi kepada prinsip moral untuk tercapainya kebahagiaan terbesar serta beberapa hal yang dapat mengakibatkan kebahagiaan dalam skala besar.

Beberapa prinsip moral lain yang memiliki cita rasa yang berdekatan dengan objektivisme adalah imperatif kategori Immanuel Kant. Prinsip moral ini meyakini ada sebuah kerancauan moral yang mengatur serta mengharuskan manusia dalam bertindak baik, buruk, benar maupun salah. Diumpakan ketika seseorang mengerjakan aksi pencurian. Dalam hatinya dia merasakan kegelisahan, atau jika tidak ia menyadari jika ada hal yang salah dalam pencurian sehingga pekerjaan mencuri sebenarnya

Konsepsi moral objektivisme dilandasi pada sebuah asumsi mendasar jika manusia memiliki sifat yang relatif sama dalam hal esensial. Asumsi ini kemudian mengantar kepada sebuah pemahaman prinsipil, setiap sesuatu yang mengantar kepada pemenuhan esensial manusia secara optimal merupakan prinsip moral yang valid secara objektif. Sehingga Pojman ketika membaca fenomena dari problematika di atas, ia mendasarkan pada keadilan pada kedua belah pihak baik mayoritas maupun minoritas.

Pada dasarnya, seperti yang telah dikatakan jika dalam asumsi Pojman, ada sifat manusia yang sama, ada seperangkat prinsip moral yang berlaku secara objektif, yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini adalah keadilan dan adil. Maka, melalui pemikiran Pojman terkait moralitas objektif dalam menilai kedua kubu tadi, seharusnya penilaian kepada kedua kubu haruslah adil. Adapun maksud keharusan penilai yang berbuat adil adalah pemerintah dan masyarakat.

Hanya karena mayoritas selalu meneriakkan NKRI Harga Mati, bukan berarti kaum minoritas anti terhadap NKRI Harga Mati. Mereka memiliki cara tersendiri dalam mengamalkan NKRI Harga Mati jauh melebihi sekedar mengatakan dan meneriakkan NKRI Harga Mati. Dapat dikatakan, boleh jadi kontra dengan pilihan mayoritas merupakan implementasi terhadap NKRI Harga Mati dari sisi tindakan. Sebab tidak lain ialah, kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang telah gagal dalam mengemban amanah rakyat. Harapan terhadap pemerintah baru

adalah alternatif untuk keluar dari sekelumit permasalahan pemerintah lama. Dengan begitu, Pojman berhasil membela kaum minoritas tanpa menyudutkan mayoritas sehingga adil dan keadilan yang merupakan moral objektif dan sama-sama diinginkan oleh seluruh manusia dapat direalisasikan.

Dengan begitu, setidaknya Pojman berhasil dalam tiga sisi. *Pertama*, ia mendistribusikan keadilan dan kebahagiaan kepada seluruh kalangan tanpa terkecuali. *Kedua*, membela minoritas sebagai konsekuensi dari penyuaran keadilan dan kebahagiaan bersama tanpa dibatasi pada golongan mayoritas maupun minoritas. *Ketiga*, mengkritik sembari memperbaiki kekurangan utilitarian Mill yang lebih banyak berpihak pada mayoritas yang berpotensi keadilan dan kebahagiaan menjadi berat sebelah.

